

## **Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Lingkungan pada Perusahaan BUMN di Indonesia**

*The Effect of Corporate Governance on Environmental Disclosure on State-Owned Enterprises in Indonesia*

Atri Dyah Utami dan Agung Nur Probohudono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret  
[atridyutm@gmail.com](mailto:atridyutm@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Environment is an integral part of company's performance and become an important issue in global competition era. The variety of environmental damage that caused by the company's activities increases stakeholder pressure on the transparency of environmental information. This study aims to examine the influence of corporate governance on the environmental disclosure and the level of environmental disclosure of SOEs in Indonesia. The hypothesis was tested using multiple linear regression model. The results revealed that the level of environmental disclosure on SOEs amounted to 14.33%. The results of hypothesis testing show that the environmental disclosure is influenced by corporate governance in terms of board size, government ownership, managerial ownership, and firm size.*

**Keyword:** corporate governance, environmental disclosure

### **PENDAHULUAN**

Isu lingkungan, sosial dan *corporate governance* dianggap penting karena keduanya merupakan bagian integral dari kinerja perusahaan (Trireksani dan Djajadikerta, 2016). Permasalahan lingkungan merupakan masalah global yang dapat memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Berbagai masalah lingkungan seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, hingga bencana alam sudah semakin banyak dirasakan dampaknya. Salah satu penyebabnya adalah adanya aktivitas industri. Hal ini karena lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan, baik untuk perusahaan yang operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam secara langsung maupun tidak.

Kasus-kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri telah banyak terjadi, seperti kasus kebocoran pipa sumur minyak di Ogan Ilir yang disebabkan oleh aktivitas PT Gold Water yang merupakan rekanan PT Pertamina dan kasus pencemaran air oleh zat kimia di daerah industri PT Pelabuhan Indonesia akibat aktivitas PT Kuala Lumpur Kepong di Dumai. Berkaca dari kasus kerusakan lingkungan yang telah terjadi, perhatian kalangan *stakeholder* dan masyarakat umum akan krusialnya isu lingkungan meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manajemen lingkungan merupakan hal penting bagi perusahaan. Tidak hanya aspek keuangan, Perusahaan perlu fokus pada aspek non-keuangan, salah satunya pada aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan yang penerapannya menguntungkan perusahaan dan *stakeholder* secara luas (Rahman dan Ismail, 2016).

Peningkatan perhatian *stakeholder* akan isu keberlanjutan telah menyebabkan meningkatnya pengungkapan informasi perusahaan mengenai praktik lingkungan, sosial

dan tata kelola (Li dkk., 2017). Organisasi menghadapi tekanan yang besar dari masyarakat dalam pertanggungjawaban lingkungan yang lebih baik dari sisi kinerja lingkungan maupun pengungkapannya seiring dengan meningkatnya daya saing global (Sen dkk., 2011). Tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya *corporate governance*. Manajemen lingkungan, kepatuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan hingga pengungkapannya dikendalikan dan diawasi melalui mekanisme *corporate governance*. Dalam praktik *good corporate governance*, perusahaan perlu melaporkan apa yang telah dilakukan termasuk upaya meminimalisir kerusakan lingkungan (Cong dan Freedman, 2011). Pengungkapan informasi yang lebih dapat menjadi peluang untuk menerapkan teori keagenan, yaitu manajer dengan akses informasi perusahaan yang lebih dapat mentransmisikan komunikasi yang kredibel dan andal ke pasar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Al-Shammari dan Al-Sultan, 2010). Perusahaan juga dapat meminimalisir dan menyelesaikan konflik keagenan serta menentukan untuk melaporkan lebih banyak informasi kinerja lingkungan secara sukarela melalui praktik *corporate governance* yang baik (Ionel-Alin dkk., 2012).

Pasca krisis politik ekonomi tahun 1997 di Indonesia, *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan yang mampu melindungi kepentingan *stakeholder* maupun perusahaan sebagai suatu entitas dan subjek hukum. Regulasi mengenai prinsip-prinsip *corporate governance* tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk perusahaan BUMN diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER - 01/MBU/2011 mengenai penerapan *corporate governance* yang baik pada BUMN dan perubahannya dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012. Menurut Warganegara dkk., (2013), penerapan *corporate governance* BUMN di Indonesia lebih kuat dibanding perusahaan swasta. Penerapan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja ekonomi secara umum serta mengurangi dampak dari krisis ekonomi. Sebagai tonggak perekonomian, perusahaan BUMN yang dianggap memiliki akses lebih diharapkan tidak bersifat eksploitatif dalam menggunakan sumber daya alam sehingga tetap mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian ini akan menguji apakah *corporate governance* dapat memengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan serta bagaimana tingkat pengungkapan lingkungan pada perusahaan BUMN yang dikatakan memiliki penerapan *corporate governance* yang lebih kuat. Penelitian sebelumnya mengenai *corporate governance* dan pengungkapan lingkungan telah dilakukan oleh Trireksani dan Djajadikerta (2016) pada perusahaan pertambangan di Indonesia dan Rao dkk., (2012) pada 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di *Australian Stock Exchange*. Pengukuran tingkat pengungkapan lingkungan pada kedua penelitian tersebut berbeda, begitu juga dengan penelitian ini yang menggunakan GRI-G4. Perbedaan lain pada penelitian ini yaitu proksi *corporate governance* dan jenis sampel yang digunakan.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan

Dalam teori ini, hubungan keagenan merupakan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Potensi konflik kepentingan prinsipal dengan agen biasanya muncul dalam hubungan keagenan. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan agen atau manajemen yang mengorbankan kepentingan prinsipal demi memaksimalkan kepentingan agen (Jensen dan Meckling,

1976). Menurut teori keagenan, salah satu peran penting pengungkapan yaitu untuk mengurangi konflik kepentingan yang timbul karena asimetri informasi (Bao, 2015). Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga memiliki peran penting dalam menyediakan laporan berkualitas (Al-Janadi dkk., 2013).

### **Pengungkapan Lingkungan**

Secara luas, pengungkapan lingkungan didefinisikan sebagai penyediaan informasi berhubungan dengan implikasi lingkungan dari operasi perusahaan (Deegan, 2006). Pengungkapan sosial dan lingkungan dapat membantu perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan publik serta *stakeholder* (Michelon dkk., 2014) dan untuk menarik investor serta memenuhi permintaan kelompok *stakeholder* (Nor dkk., 2016). Selain itu, pengungkapan lingkungan juga membantu perusahaan untuk menilai kemungkinan risiko serta untuk mengurangi dampak risiko operasi terhadap lingkungan (Rao dkk., 2012). Menurut teori keagenan, pengungkapan perusahaan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi masalah keagenan, tetapi pengungkapan yang lebih baik juga mungkin dapat memperparah masalah keagenan dan biaya terkait (Hermalin dan Weisbach, 2012).

Di Indonesia, pengungkapan lingkungan bersifat *mandatory* bagi perusahaan publik sesuai Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 yang mengatur mengenai laporan tahunan perusahaan publik dan emiten. Pengungkapan lingkungan bersifat *voluntary* bagi perusahaan non-publik, tetapi praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi perusahaan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 dan lebih lanjut dijelaskan dalam PP Nomor 47 Tahun 2012.

### **Corporate governance**

*Corporate governance* merupakan mekanisme perusahaan dalam mengelola dan memenuhi berbagai kepentingan pemegang saham atau pemilik dan *stakeholder*. Menurut sudut pandang teori keagenan, kebutuhan akan *corporate governance* muncul untuk menghindari dan mengurangi konflik keagenan. Meskipun sistem *corporate governance* berbeda di berbagai negara, mekanisme tertentu diperlukan untuk memastikan keterbukaan dan transparansi perusahaan serta meminimalkan masalah pelanggaran (Pillai dan Al-Malkawi, 2017). Tata kelola yang efektif juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang nantinya menghasilkan lebih banyak pengungkapan, baik wajib maupun sukarela (Rao dkk., 2012).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut Lakhali (2005), pengawasan tindakan manajemen dinilai lebih efektif apabila ukuran dewan relatif kecil sehingga penanganan konflik keagenan dapat teratasi dengan baik. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan berdampak pada proses komunikasi yang lambat sehingga menghambat pengambilan keputusan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas dewan komisaris.

H<sub>1</sub> Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan

### **Komisaris Independen dan Pengungkapan Lingkungan**

Independensi komisaris independen memiliki peran penting untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen (Jensen dan Meckling, 1976) dan mengatasi konflik keagenan antara prinsipal dengan agen. Melalui jumlah komisaris independen yang lebih

banyak, diharapkan dapat memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawabnya termasuk terhadap lingkungan. Efektivitas komisaris independen yang terpenuhi dapat diberdayakan guna menegakkan pengungkapan oleh manajemen dan diharapkan mampu melaporkan lebih banyak pengungkapan (Aboagye-Otchere dkk., 2012).

H<sub>2</sub> Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

### ***Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan Lingkungan***

Tipe kepemilikan dalam *corporate governance* terbagi menjadi kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemegang saham (Eng dan Mak, 2003). Kepemilikan pemerintah mengacu pada proporsi saham milik pemerintah dalam perusahaan. Pada perusahaan BUMN, kepemilikan pemerintah paling sedikit 51% sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan yang lebih sedikit. Hal ini karena, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dapat memperoleh informasi melalui internal perusahaan.

H<sub>3</sub> Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan

### ***Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Lingkungan***

Menurut Barros dkk., (2013), pemisahan kepemilikan dan kontrol dianggap sebagai sumber konflik antara manajer dan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi dalam perusahaan memiliki kepentingan umum yang rendah sehingga memungkinkan berkurangnya kepentingan *stakeholder*. Manajer dengan pengaruh lebih besar juga berupaya untuk mengurangi tanggung jawab sosial sehingga kepemilikan manajerial yang lebih rendah dikaitkan dengan peningkatan pengungkapan sukarela (Probohudono dkk., 2013).

H<sub>4</sub> Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.

### ***Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Lingkungan***

Ukuran perusahaan mengacu pada jumlah total aset akhir tahun. Menurut teori keagenan, perusahaan dengan biaya keagenan tinggi akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki pengawasan publik yang lebih. Selain itu, penelitian Zeng dkk., (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki pengungkapan lingkungan yang lebih baik.

H<sub>5</sub> Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pemilihan Sampel**

Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih dalam jumlah tertentu berdasarkan kriteria peneliti. Sampel dalam penelitian ini berupa perusahaan BUMN Indonesia yang berbentuk perseroan dan perseroan terbuka yang melaporkan laporan tahunan selama tahun 2014-2016. Laporan tahunan diperoleh melalui situs resmi (*website*) perusahaan terkait. Perusahaan BUMN dipilih sebagai

sampel karena penerapan *corporate governance* dinilai lebih kuat dan sebagai perusahaan negara yang menjadi tonggak perekonomian, BUMN diharapkan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih baik dari perusahaan swasta. Selain itu, hasil penilaian PROPER menunjukkan bahwa perusahaan BUMN lebih disiplin dari perusahaan swasta.

### Definisi dan pengukuran variabel

Definisi dan pengukuran variabel penelitian diuraikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Definisi dan Pengukuran Variabel		
Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen		
Pengungkapan Lingkungan	indikator yang harus diungkapkan dalam kategori pengungkapan lingkungan menurut GRI-G4	$PL = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{34 \text{ item GRI - G4}}$
Variabel Independen		
Ukuran Dewan Komisaris	Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota komisaris dalam perusahaan.	DK = jumlah anggota dewan komisaris
Komisaris Independen	Komisaris independen yaitu komisaris yang secara resmi menjabat sebagai komisaris independen.	$KI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}$
Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan pemerintah merupakan proporsi saham milik pemerintah dalam suatu perusahaan.	$KP = \frac{\text{jumlah saham pemerintah}}{\text{total saham perusahaan}}$
Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh direktur perusahaan.	$KM = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki direksi}}{\text{total saham perusahaan}}$
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan merupakan jumlah total aset akhir tahun.	$UK = \log \text{total aset akhir tahun}$
Variabel Kontrol		
Umur Perusahaan	Umur perusahaan merupakan jumlah tahun sejak tahun perusahaan berdiri	$UM = \Sigma \text{ tahun sejak perusahaan berdiri}$
Tipe Industri	Tipe industri dibagi menjadi <i>high profile companies</i> dan <i>low profile companies</i> . Perusahaan yang masuk kategori <i>high profile companies</i> adalah perusahaan yang beroperasi di industri yang sensitif terhadap lingkungan.	TI = variabel dummy dengan nilai 1 untuk <i>high profile companies</i> dan nilai 0 untuk <i>low profile companies</i>

sumber : kompilasi dari beberapa data

## Model penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji tingkat pengungkapan lingkungan dan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan BUMN di Indonesia. Tingkat pengungkapan lingkungan dalam penelitian ini dapat diuji melalui statistik deskriptif, sedangkan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan *corporate governance* dengan pengungkapan lingkungan dilakukan dengan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PL = b + b_1DK + b_2KI + b_3KP + b_4KM + b_5UK + b_6UM + b_7TI + e$$

dengan

- PL = Pengungkapan lingkungan
- DK = Ukuran dewan komisaris
- KI = Komisaris independen
- KP = Kepemilikan pemerintah
- KM = Kepemilikan manajerial
- UK = Ukuran perusahaan
- UM = Umur perusahaan
- TI = Tipe industri
- e = eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Jumlah sampel akhir yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 147 perusahaan selama tahun 2014-2016. Semua sampel tersebut terdiri dari perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan dan perseroan terbuka. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
PL	147	0,0000	0,4705882	0,143257	0,111294662
DK	147	2	10	5,24	1,504938598
KI	147	0,000	0,75	0,24757	0,211940954
KP	147	0,51	1	0,87182	0,184401276
KM	147	0,0000000	0,00436	0,000117861	0,000530576
UK	147	11,4713	15,1187	13,177421	0,868550245
UM	147	10	115	43,23	20,37325269
TI	147	0	1	0,46	0,500302769
Valid N (listwise)	147				
PL = Pengungkapan Lingkungan, DK = Ukuran Dewan Komisaris, KI = Komisaris Independen, KP = Kepemilikan Pemerintah, , KM = Kepemilikan Manajerial, UK = Ukuran Perusahaan, UM = Umur Perusahaan, TI = Tipe Industri					

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Rata-rata tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan BUMN mencapai 14,33%, yang berarti bahwa rata-rata perusahaan mengungkapkan empat hingga lima item pengungkapan lingkungan dari 34 item yang ada. Nilai minimum pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai nol, yang berarti terdapat perusahaan yang tidak mengungkapkan item pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Tingkat pengungkapan lingkungan tertinggi mencapai 47,06% yaitu melaporkan sekitar 16 item pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Rata-rata jumlah komisaris dalam perusahaan sebanyak lima orang dengan jumlah paling sedikit sebanyak dua orang dan jumlah komisaris paling banyak mencapai 10 orang. Rata-rata proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris mencapai 24,76% dengan proporsi terendah mencapai 0 yang artinya masih terdapat perusahaan yang belum memiliki komisaris independen dan proporsi tertinggi mencapai 0,75%. Rata-rata kepemilikan pemerintah dalam perusahaan BUMN mencapai 87,18% dengan kepemilikan terendah dan tertinggi masing-masing 51% dan 100%. Rata-rata tersebut cenderung tinggi karena sebagian besar perusahaan BUMN berbentuk perseroan. Rata-rata kepemilikan manajerial mencapai 0,12% dengan kepemilikan manajerial terendah dan tertinggi masing-masing 0% dan 0,44%. Rata-rata tersebut cenderung rendah karena perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbuka yang memungkinkan untuk memiliki kepemilikan saham oleh manajemen hanya berjumlah 20 perusahaan. Rata-rata

ukuran perusahaan dari *log* total aset akhir tahun mencapai 13,177421, sedangkan nilai terendah dan tertinggi dari *log* total aset akhir tahun masing-masing sebesar 11,4713 dan 15,1187. Rata-rata umur perusahaan BUMN mencapai 43,23 tahun, sedangkan umur perusahaan termuda dan tertua masing-masing 10 tahun dan 115 tahun. Tingkat pengungkapan lingkungan berdasarkan indikator yang ada dalam pengungkapan lingkungan menurut GRI-G4 diuraikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Indikator Pengungkapan Lingkungan

<b>Indikator</b>	<b>Data Pooled</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bahan	17,54%	15,74%	13,73%	23,15%
Energi	24,85%	27,04%	21,96%	25,56%
Air	11,34%	8,02%	12,41%	13,58%
Keanekaragaman Hayati	14,32%	13,43%	14,71%	14,81%
Emisi	9,79%	10,58%	9,80%	8,99%
Efluen dan Limbah	9,56%	7,78%	9,41%	11,48%
Produk dan Jasa	3,16%	2,78%	3,92%	2,78%
Kepatuhan	7,15%	7,41%	2,94%	11,11%
Transportasi	1,89%	0%	1,96%	3,7%
Lain-lain	32,75%	35,19%	1,96%	61%
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	2,54%	1,85%	3,92%	1,85%
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	11,22%	5,56%	5,88%	22,22%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Menurut hasil pengujian pada tabel di atas, indikator yang paling banyak diungkapkan dalam laporan tahunan yaitu indikator lain-lain yang rata-ratanya mencapai 32,75%. Indikator ini merupakan indikator yang berupa total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan. Sementara itu, indikator yang paling sedikit dilaporkan dalam pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan yaitu indikator transportasi yang rata-ratanya sebesar 1,89%. Indikator ini merupakan indikator yang berupa dampak signifikan lingkungan dari pengangkutan produk, barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.

## Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 21. Hasil pengujian hipotesis diuraikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,223	,164		-1,358	0,177
	BOARD	-,015	,008	-,207	-2,025	0,045**
	KOMIN	-,003	,042	-,007	-,082	0,935
	GO	-,295	,058	-,489	-5,118	0*
	MO	-27,061	14,535	-,129	-1,862	0,065***
	SIZE	,053	,013	,410	4,174	0*
	AGE	,000	,000	,056	,819	0,414
	TYPE	,005	,015	,025	,362	0,718

\*signifikan pada tingkat 1%, \*\*signifikan pada tingkat 5%, \*\*\*signifikan pada tingkat 10%

PL = Pengungkapan Lingkungan, DK = Ukuran Dewan Komisaris, KI = Komisaris Independen, KP = Kepemilikan Pemerintah, KM = Kepemilikan Manajerial, UK = Ukuran Perusahaan, UM = Umur Perusahaan, TI = Tipe Industri

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Hasil uji regresi variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0,045 dan nilai *t* negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif pada tingkat 5% terhadap pengungkapan lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka semakin rendah tingkat pengungkapan lingkungan. Hasil ini sama dengan hipotesis penelitian sehingga  $H_1$  diterima. Selain itu, hasil ini juga mendukung hasil penelitian Cheng (2008) dan pernyataan bahwa ukuran dewan yang relatif kecil dinilai lebih efektif dalam mengawasi tindakan manajemen. Rata-rata ukuran dewan dalam sampel sebanyak lima orang. Hal ini dapat dikatakan efektif karena menurut teori agensi, semakin banyak jumlah dewan maka masalah keagenan dalam perusahaan dapat semakin serius.

Hasil uji regresi variabel komisaris independen menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0,935 dan *t* negatif. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan pada tingkat 10% sehingga  $H_2$  ditolak. Disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan dan hasil ini mendukung penelitian Liu dan Zhang (2016). Peran komisaris independen dalam perusahaan masih terbatas sehingga tidak memengaruhi kebijakan pelaporan informasi lingkungan. Jumlah komisaris independen dalam sampel sebesar 24,76%. Walaupun sudah memenuhi ketentuan minimal peraturan Menteri BUMN, masih ada beberapa perusahaan yang belum memiliki komisaris independen. Hasil hipotesis ini dapat dikarenakan peran komisaris independen dalam perusahaan hanya sekedar untuk memenuhi kepatuhan

sehingga peran komisaris independen tidak efektif.

Hasil uji regresi variabel kepemilikan pemerintah menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0 dan nilai *t* negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif pada tingkat 1% terhadap pengungkapan lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan pemerintah dalam perusahaan maka semakin rendah tingkat pengungkapan lingkungan. Hasil ini sama dengan hipotesis penelitian sehingga  $H_3$  diterima. Tingginya kepemilikan pemerintah menyebabkan pengungkapan informasi lingkungan bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Proporsi kepemilikan pemerintah dalam sampel cukup tinggi, mencapai 87,18%. Oleh karena itu, tekanan akan transparansi pengelolaan lingkungan tidak terlalu besar. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dapat memperoleh informasi melalui internal perusahaan.

Hasil uji regresi variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0,065 dan nilai *t* negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif pada tingkat 10% terhadap pengungkapan lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat pengungkapan lingkungan. Hasil ini sama dengan hipotesis penelitian sehingga  $H_4$  diterima dan mendukung penelitian Eng dan Mak (2003). Tingkat kepentingan umum yang rendah mengakibatkan rendahnya tekanan untuk melaporkan informasi lingkungan oleh perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih sedikit.

Hasil uji regresi variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0 dan nilai *t* positif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif pada tingkat 1% terhadap pengungkapan lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai total aset perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan lingkungan. Hasil ini sama dengan hipotesis penelitian sehingga  $H_5$  diterima dan mendukung penelitian Haji dan Ghazali (2013). Perusahaan yang besar memiliki perhatian yang lebih besar dari pihak luar sehingga dituntut untuk memiliki kebijakan yang baik termasuk kepatuhan pada permintaan transparansi informasi.

Hasil uji regresi variabel kontrol umur perusahaan dan tipe industri menunjukkan nilai *sig.* masing-masing sebesar 0,414 dan 0,718, serta *t* positif. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan pada tingkat 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan dan tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Keputusan manajemen dalam melakukan pengungkapan tidak mengacu pada umur perusahaan ataupun tipe industri mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengungkapan lingkungan pada perusahaan BUMN masih cukup rendah, yaitu 14,33%. Menurut hasil pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa variabel dari *corporate governance* yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan terdiri dari ukuran dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. Sementara itu, variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, begitu juga dengan variabel kontrol umur perusahaan dan tipe industri. Efektivitas mekanisme *corporate governance* dan keputusan dalam melaporkan informasi lingkungan menjadi hal penting berkaitan dengan hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Selain itu, hal ini juga penting kaitannya dengan pengungkapan lingkungan sebagai alat komunikasi dalam

menjaga hubungan dengan *stakeholder*.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu penambahan jumlah sampel dan variabel penelitian. Selain itu, diperlukan juga pengukuran pengungkapan lingkungan lain yang merujuk pada peraturan yang berlaku sehingga hasil pengukuran pengungkapan lingkungan lebih relevan. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan analisis perbandingan antara tahun sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi manajemen dan para *stakeholder*. Manajemen perusahaan diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab lingkungan termasuk transparansi informasi dalam *annual report* (laporan tahunan). Hal ini penting karena sebagai perusahaan BUMN yang menerapkan praktik *corporate governance* yang lebih kuat dari perusahaan swasta dapat dijadikan acuan bagi perusahaan swasta dalam meningkatkan tanggung jawab lingkungan dan sosial melalui pengungkapan dalam laporan tahunan. Keterbatasan pada penelitian ini terdapat pada sedikitnya jumlah sampel. Hal ini karena banyak perusahaan BUMN yang belum mengunggah laporan tahunan mereka dalam situs resmi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aboagye-Otchere, F., Bedi, I., & Kwakye, T.O. 2012. Corporate governance and disclosure practices of Ghanaian listed companies. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 2(2), 140-161.
- Al-Janadi, Y., Rahman, R.A., & Omar, N.H. 2013. Corporate governance mechanism and voluntary disclosure in Saudi Arabia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 25-35.
- Al-Shammari, B., & Al-Sultan, W. 2010. Corporate governance and voluntary disclosure in Kuwait. *International Journal of Disclosure and Governance*, 7(3), 262-280.
- Bao, Jiecheng. 2015. An assessment of the environmental information disclosure of listed companies in Zhejiang Province China. *Social Impact Research Experience (SIRE)*, 41(2015).
- Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. 2013. Corporate governance and voluntary disclosure in France. *The Journal of Applied Business Research*, 29(2), 561-578.
- Cheng, S. 2008. Board size and the variability of corporate performance. *Journal of Financial Economics*, 87, 157-176.
- Cong, Y., & Freedman, M. 2011. Corporate governance and environmental performance and disclosures. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 27(2011), 223-232.
- Deegan, C. 2006. *Financial Accounting Theory* (2<sup>nd</sup> Ed.). Sydney: McGraw-Hill.
- Eng, L.L., & Mak, Y.T. 2003. Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(2003), 325-345.
- Haji, A.A., & Ghazali, N.A.M. 2013. A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 21(1), 27-52.
- Hermalin, B. E., & Weisbach, M.S. 2012. Information disclosure and corporate governance. *The Journal of Finance*, 67(1), 195-233.
- Ionel-Alin, I., Emil, P.I., & Maria, I.N. 2012. Environmental reporting and good practice of corporate governance: petroleum industry case study. *Procedia Economics*

*and Finance*, 3(2012), 961-967.

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(1976), 305-360.

Lakhal, F. 2005. Voluntary earnings disclosures and corporate governance: evidence from France. *Review of Accounting and Finance*, 4(3), 64-85.

Li, D., Cao, C., Zhang, L., Chen, X., Ren, S., & Zhao, Y. 2017. Effects of corporate governance environmental responsibility on financial performance: the moderating role of government regulation and organizational slack. *Journal of Cleaner Production*, (2017).

Liu, X., & Zhang, C. 2016. Corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value in China. *Journal of Cleaner Production*, (2016), 1-29.

Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. 2014. CSR reporting practices and the quality of disclosure: an empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 33(2014), 59-78.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Pemerintah Indonesia Nomor KEP-431/BL/2012 Pelaporan Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. 1 Agustus 2012. Jakarta.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. 06 Juli 2012. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. 1 Agustus 2011. Jakarta.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. 29 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5911. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 4 April 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.

Pillai, R. & Al-Malkawi, H.N. 2017. On the relationship between corporate governance and firm performance: evidence from GCC countries. *Research in International Business and Finance*, 7(2017), 1-45.

Probohudono, A.N., Tower, Greg., & Rusmin, R. 2013. Risk disclosure during the global financial crisis. *Social Responsibility Journal*, 9(1), 124-136.

Rahman, I.M.A., & Ismail, K.N.I.K. 2016. The effect of political connection on corporate social responsibilities disclosure - evidence from listed companies in Malaysia. *International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 - 8028*, 5(2), 16-21.

Rao, K.K., Tilt, C.A., & Lester, L.H. 2012. Corporate governance and environmental reporting: an Australian study. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 12(2), 143-163.

Sen, M., Mukherjee, K., & PattanayaK, J.K. 2011. Corporate environmental disclosure practices in India. *Journal of Applied Accounting Research*, 12(2), 139-156.

Trireksani, T., & Djajadikerta, H.G. 2016. Corporate governance and environmental disclosure in the Indonesian mining industry. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 10(1), 19-28

Zeng, S. X., Xu, C. D., & Yin, H.T. 2012. Factors that drive Chinese listed companies in voluntary disclosure of environmental information. *Journal of Business Ethics*, 109, 309-321.